

Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Dalam Pembangunan Di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

Leo Sandy Suganda¹ Syapril Abdullah²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia.

leosandysuganda@student.uir.ac.id syaprilabdullah@soc.uir.ac.id

Received : 12 Juni 2025

Abstract

This study aims to determine how the Village Consultative Body (BAPEKAM) functions in development in Benteng Hulu Village, Mempura District, Siak Regency. The indicators in this study are the functions of the Village Consultative Body, namely discussing and agreeing on Village Regulations with the Penghulu, accommodating and channeling the aspirations of the Village community, and supervising the performance of the Village Penghulu. The method used in this study is a descriptive and qualitative method. The techniques used for data collection in this study are observation, interviews, and documentation. Based on the data analysis techniques used in this study, researchers went into the field to conduct research and concluded that the function of the Village Consultative Body (BAPEKAM) in the development of Benteng Hulu Village began with coordination between the Village Consultative Body, the Village Government, and the village community, but the lack of participation of BAPEKAM members and the community in deliberations and the lack of BAPEKAM supervision of the performance of the Village Government so that there are several developments that are not on target and not in accordance with their planning.

Key Words : BAPEKAM, Fungsian

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam pembangunan di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Indikator pada penelitian ini adalah fungsi dari Badan Permusyawaratan Kampung yaitu membahas dan menyepakati Peraturan Kampung bersama Penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung, melakukan pengawasan terhadap kinerja Penghulu Kampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini peneliti terjun kelapangan melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam pembangunan Kampung Benteng Hulu diawali dengan koordinasi antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan masyarakat kampung, akan tetapi kurangnya partisipasi anggota BAPEKAM dan masyarakat dalam musyawarah serta kurangnya pengawasan BAPEKAM terhadap kinerja Pemerintah Kampung sehingga terdapat beberapa pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan perencananya

Key Words : BAPEKAM, Fungsi

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung terdapat suatu lembaga legislatif di tingkat Kampung yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di Kampung yaitu Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) yang mewakili penduduk Kampung sebagai lembaga yang mewujudkan demokarsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan karena mereka dapat berinteraksi langsung kepada masyarakat mengenai apa yang mereka perlukan untuk mencapai keadilan secara merata. Oleh karena itu, Pemerintahan Kampung harus diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang tanggap terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat Kampung.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung mendefinisikan kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari perubahan nama ini adalah untuk mempertahankan nama lama yang digunakan untuk desa sebelum terbentuknya kabupaten Siak dan menata kembali nama desa dalam bahasa melayu dengan sebutan "kampung" di kabupaten Siak.

Dengan ditetapkannya perubahan penamaan Desa menjadi Kampung maka nama badan pemerintahaan Desa pun ikut berubah yaitu Kepala Desa menjadi Penghulu, Sekretaris Desa menjadi Kerani, Kepala Urusan menjadi Juru Tulis, Rukun Warga menjadi Rukun Kampung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung menjelaskan bahwa Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Kampung merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Badan Permusyawaratan Kampung mempunyai kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung sebagai berikut :

1. Kedudukan BAPEKAM
 - a. BAPEKAM sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan Pemerintahan Kampung.
 - b. BAPEKAM sebagai wadah untuk menjalankan Demokrasi Pancasila.
2. Fungsi BAPEKAM
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama Penghulu.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Penghulu.
- 3. Tugas dan wewenang BAPEKAM
 - a. Membahas rancangan Peraturan Kampung bersama Penghulu.
 - b. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Penghulu.
 - c. Memberikan usulan pengangkatan dan pemberhentian penghulu.
 - d. Menyiapkan panitia untuk pemilihan Penghulu.
 - e. Menggali, menerima, mengumpulkan, memilah dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - f. Menyelenggarakan perubahan Peraturan Kampung bersama Penghulu.
 - g. Membuat kode etik BAPEKAM.
 - h. Menentukan calon Penghulu terpilih.
- 4. BAPEKAM mempunyai hak
 - a. Sebagai pengawas dan meminta Pemerintah Kampung untuk menjelaskan tentang pelaksanaan Pemerintahan Kampung
 - b. Menyatakan pendapatnya tentang pelaksanaan Pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat Kampung
 - c. Mendapatkan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan Belanja Kampung
- 5. Kewajiban anggota BAPEKAM
 - a. Menaati dan menjalankan Pancasila, menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
 - b. Menjalankan demokrasi yang berkeadilan gender dalam pengelolaan Pemerintahan Kampung.
 - c. Menerima, mengumpulkan, memprioritaskan dan melanjutkan aspirasi masyarakat Kampung kepada Pemerintah Kampung.
 - d. Memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
 - e. Menyelesaikan proses pemilihan Penghulu.
 - f. Menjaga standar dan prinsip moral dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Kampung.
 - g. Menghargai prinsip sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat.
 - h. Menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat.
 - i. Menjaga reputasi BAPEKAM.
 - j. Mengikuti dan melaksanakan sumpah pelantikan

Badan Permusyawaratan Kampung dan penghulu harus menjalin hubungan yang positif, karena penghulu sebagai pemimpin memerlukan kehadiran Badan Permusyawaratan Kampung yang berperan menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan memberikan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kampung agar lebih demokratis, terarah dan membuatnya lebih transparan. Badan Permusyawaratan Kampung mempunyai kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

Sebagai badan pengawas, Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) ditugaskan untuk mengelola pelaksanaan kebijakan Kampung, Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) dan mengevaluasi keputusan Penghulu. Selain itu, organisasi kemasyarakatan Kampung dapat dibentuk dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan Kampung agar meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kampung.

Fungsi BAPEKAM sebagai Pengawas Kinerja Penghulu terhambat karena masih adanya rasa segan dan kurangnya kesadaran individu dari anggota BAPEKAM akan kedudukannya yang sejajar dengan pemerintah Kampung. Sebagai penyalur aspirasi masyarakat Kampung dimana diketahui masyarakat menyampaikan aspirasi terhadap BAPEKAM melalui RT/RW, Kepala Dusun serta Pemuka atau tokoh yang dituakan dalam lingkungan masyarakat yang dipilih langsung maupun melalui kegiatan musyawarah Kampung. Usulan-usulan tersebut di data BAPEKAM dan dikoreksi untuk mempertimbangkan suatu usulan yang meliputi tujuan kepentingan semua warga Kampung bukan untuk keperluan pribadi atau dari suatu kelompok dan golongan tertentu dan usulan tersebut akan dipertimbangkan lagi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (MUSRENBANG).

Pelaksanaan rancangan pembangunan Kampung sangatlah dibutuhkan keikutsertaan masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhannya, semakin banyak masyarakat yang terlibat maka hasil Musyawarah Kampung menjadi semakin adil dihadapan masyarakat. Karena itu Musyawarah Kampung dibuat untuk umum dan tidak bersifat rahasia. Permendes No.21 Tahun 2020 menjadi acuan dalam melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (MUSRENBANG). Di samping itu, ketentuan mengenai Musrenbang juga disebutkan dalam Permendagri No.114 Tahun 2014. Musrenbang Kampung merupakan musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung dengan Pemerintah Kampung serta unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung Untuk menetapkan program, kegiatan, maupun Pembangunan yang dibutuhkan Kampung yang didanai oleh APBKampung, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 54, Musyawarah Kampung harus diadakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai perencanaan dan tujuan kedepannya yang strategis untuk Kampung. Salah satu hal penting yang perlu dibahas saat muncul atau diperlukan, termasuk pembentukan atau pembubaran BUMKampung, pengelolaan atau pengalihan aset Kampung, koordinasi antar Kampung, dan pengkajian RPJM. Masalah strategis yang perlu didiskusikan setiap tahun meliputi penetapan kepentingan utama belanja Kampung sesuai dengan yang dibutuhkan Kampung serta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pembangunan pada tahun sebelumnya. Musyawarah Kampung dilaksanakan oleh BAPEKAM dengan dana yang bersumber dari APBKampung. Kegiatan ini sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang berlandaskan musyawarah, di mana keputusan penting yang berpengaruh pada kehidupan warga Kampung diambil bukan hanya oleh Pemerintah Kampung, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Zulkifli (2009; 8) administrasi adalah proses aktivitas yang mencakup keseluruhan proses di mana berbagai individu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut White (Syafri 2012;9) Administration can be defined as the activities of group efforts, public, private, civil or military. Jadi, baginya administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Siagian (dalam Syafie 2010;14) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Adams (Syafri 2012;8) administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial.

Konsep Organisasi

Definisi organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu perspektif yang tetap dan perspektif yang berubah. Organisasi apabila dilihat dari sudut pandang yang tetap, mengandung makna sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, organisasi dapat dipahami sebagai tempat, ruang, atau sarana bagi individu-individu yang bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Di dalam ruang kegiatan ini, setiap individu harus memahami peran mereka masing-masing dengan jelas. Setiap organisasi memiliki pola dasar dari struktur yang tetap, namun tidak menentang kemungkinan adanya perkembangan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

Pengertian organisasi yang memiliki sifat dinamis dapat dipahami melalui berbagai aspek seperti dinamika, kegiatan yang berlangsung, serta pola interaksi kerja yang ada di dalam organisasi, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Interaksi yang bersifat resmi dapat dilihat pada struktur kerja yang mencakup semua tanggung jawab dari organisasi yang telah disahkan secara formal. Sementara itu, interaksi yang bersifat informal tampak dalam perilaku dan tindakan setiap anggota dalam menjalin hubungan pribadi, baik antara atasan dan bawahan maupun di antara sesama rekan kerja

Konsep Manajemen

Dalam Badrudin 2017;3 menyatakan bahwa manajemen adalah kombinasi seni dan ilmu yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Badrudin (2017;2) berpendapat bahwa manajemen adalah suatu disiplin ilmu yang bertugas untuk menemukan kebenaran dalam aspek teoritis dan metodologis yang harus diuji dan dibuktikan dengan fakta atau data yang obyektif. Oleh sebab itu, pengembangan ilmu manajemen adalah hal yang krusial untuk memperoleh kebenaran dalam bidang ilmu.

Terry, 2014) menjelaskan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dinamakan manajemen, dan individu yang melaksanakan proses ini disebut sebagai manajer.

Konsep Pemerintah Kampung

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Mengenai Penggantian Nama Desa Menjadi Kampung, Kampung sebagai sebutan alternatif untuk desa adalah sebuah entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang dalam mengatur dan menangani urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif komunitas, hak asal, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari perubahan nama ini adalah untuk menjaga penggunaan nama lama yang sebelumnya ada sebelum pendirian kabupaten Siak dan merapikan penamaan dalam bahasa melayu untuk desa menjadi kampung di kabupaten Siak.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menyatakan bahwa desa merupakan suatu komunitas hukum yang memiliki batasan wilayah yang jelas, serta berhak untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Hal ini berdasarkan pada sejarah dan tradisi lokal yang diakui atau dibentuk dalam kerangka Pemerintahan Nasional dan terletak di wilayah kabupaten atau kota.. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Konsep Badan Permusyawaratan Kampung

Abdullah (2007:171) menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, merupakan sebuah organisasi yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Perwakilan Desa, dengan tugas untuk bersama Kepala Desa menyusun Peraturan Desa dan menampung serta mengalirkan aspirasi dari masyarakat.

Menurut Widjaja (2003) dalam karyanya berjudul “otonomi desa”, badan permusyawaratan desa diartikan sebagai sarana yang merefleksikan prinsip demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. BPD memiliki peran krusial dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa dengan sejumlah fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan merancang peraturan kampung bersama penghulu kampung dalam menetapkan Rancangan peraturan kampung bersama penghulu kampung bersama penghulu kampung merupakan keaktifan badan permusyawaratan kampung Dalam perlibatannya dalam proses pembuatan peraturan kampung melakukan perumusan peraturan kampung serta menetapkan produk peraturan kampung guna diharapkan dapat membawa manfaat yang besar dengan adanya peraturan tersebut kesejahteraan bagi masyarakat kampung petualang yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengesahan peraturan kampung. dan yang terpenting juga memiliki hak dalam tidak menerbitkannya produk peraturan kampung yang sudah dahulu ada ada sekiranya belum dapat menghasilkan dampak yang baik dalam perkembangan keberlangsungan masyarakat kampung.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang ada di masyarakat guna di serap dan di sampaikan dalam rapat sehingga dari aspirasi tersebut bisa terbentuk sebuah peraturan kampung.
- c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggara peraturan Kampung dan peraturan Penghulu Kampung. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan Kampung dan peraturan kampung badan permusyawaratan juga memiliki tugas yang sangat penting di mana mengawasi keberlangsungan untuk menahan perwujudan peraturan kampung serta keputusan dari pembentukan peraturan yang terlebih dahulu ditetapkan, bapekam tidak mesti berfokus pada pengawasan penghulu Kampung juga mampu memonitor Pengalokasian dana kampung guna dana tersebut dapat dimanfaatkan serta diserap memenuhi kebutuhan masyarakat Kampung secara maksimal.

Konsep Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Sutan, 1996:412), mengemukakan "fungsi adalah jabatan atau kedudukan". Dari pendapat tersebut diketahui bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan pendapat yang disebutkan, Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (Sule, 2006:8) menjelaskan bahwa "fungsi-fungsi manajemen adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam manajemen sesuai dengan tiap fungsi dan mengikuti langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya.

Konsep Pembangunan

Pembangunan Negara dan Bangsa bertujuan untuk menciptakan sebuah negara yang seimbang dan makmur, baik dari segi materi maupun spiritual, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, pembangunan memiliki sifat sebagai proses yang berkesinambungan yang mencerminkan kemajuan serta perbaikan menuju tujuan yang diinginkan.

Sedangkan pendapat Agus Suryono (2008 : 62) konsep pembangunan adalah usaha harus selalu dilakukan dengan tujuan memposisikan individu pada posisi dan perannya secara wajar yakni sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras, dan dinamis, sedangkan kedalam mampu menciptakan keseimbangan.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan

dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh sebuah kebenaran, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Dalam Pembangunan Di Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak

1. Membahas dan Menyetakati Rancangan Peraturan Kampung Bersama Penghulu Kampung

Fungsi pengawasan dan penyetakatan peraturan kampung bersama Penghulu Kampung Benteng Hulu telah berjalan cukup baik. BAPEKAM memiliki aturan kuorum (kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya agar dapat mengesahkan suatu putusan. Biasanya kuorum terdiri lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir dalam rapat). Minimal 60% anggota hadir untuk membahas dan menyetakati peraturan kampung, dimana dalam pelaksanaannya pernah beberapa kali rapat yang diselenggarakan terbatal sebab kurangnya kehadiran dari anggota BAPEKAM dalam membahas dan menyetakati Peraturan Kampung, namun BAPEKAM tetap berupaya menjalankan fungsinya dengan melibatkan berbagai pihak untuk menjaga kepentingan bersama, serta melakukan evaluasi kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan terutama dalam hal anggaran dan perencanaan pembangunan di Kampung Benteng Hulu

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kampung

BAPEKAM Menurut penjelasan Bapak Sulaiman, BAPEKAM menerima dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kampung dengan mempertimbangkan prioritas dan ketersediaan dana, dimana fokus utama adalah pembangunan infrastruktur di Kampung Benteng Hulu, namun menghadapi kendala seperti luasnya wilayah, kepadatan penduduk, keterbatasan anggaran, dan kurangnya komunikasi antara BAPEKAM dengan masyarakat sehingga perlu peningkatan peran BAPEKAM sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan keinginan Benteng Hulu. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan masyarakat, terlihat bahwa BAPEKAM masih kurang proaktif dalam menjemput aspirasi warga, terutama dalam mengidentifikasi dan menyerap keluhan yang menjadi fokus utama masyarakat Kampung Benteng Hulu.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura

Menurut Penghulu Kampung Benteng Hulu, salah satu faktor utama yang menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) adalah kurangnya pemahaman anggota tentang peran dan tanggung jawabnya.

Tanpa pembekalan yang memadai, anggota BAPEKAM mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya secara efektif, terutama dalam hal: Pengawasan terhadap Pemerintahan Kampung Kurangnya pemahaman tentang undang-undang dan tata

kelola pemerintahan dapat menghambat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kampung.

Penyaluran Aspirasi Masyarakat: Jika anggota BAPEKAM tidak memahami bagaimana menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat, keberadaan mereka menjadi kurang efektif.

Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Kampung Kebijakan yang dibuat kurang optimal atau tidak sesuai dengan kebutuhan dapat dihasilkan karena tidak memahami regulasi dan peraturan. Kendala Organisasi seperti, Kurangnya koordinasi antar anggota BAPEKAM, Rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan pertemuan. Keterbatasan Anggaran seperti, Terbatasnya dana operasional untuk menjalankan program, Kurangnya insentif untuk anggota BAPEKAM, dan Minimnya sarana dan prasarana pendukung. Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi dan peran penting BAPEKAM dalam pembangunan kampung, Rendahnya pemahaman tentang manfaat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat masih menganggap BAPEKAM hanya sebagai formalitas kelembagaan, dan Kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi BAPEKAM kepada masyarakat.

Hambatan Struktural

- Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah

Minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan permasalahan BAPEKAM, Terbatasnya program pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota BAPEKAM, Kurangnya bantuan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPEKAM, Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dari pemerintah daerah

- Terbatasnya akses terhadap informasi dan program pembangunan

Kurangnya sosialisasi program-program pembangunan dari tingkat kabupaten/kota, Minimnya kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi. Kendala-kendala tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas BAPEKAM dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat kampung. Diperlukan upaya sistematis dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna meningkatkan kinerja BAPEKAM dalam melayani masyarakat dan mendukung pembangunan Kampung Benteng Hulu.

Kesimpulan

Masih rendahnya pemahaman anggota BAPEKAM tentang proses legislasi, Kurangnya koordinasi antara BAPEKAM dengan Penghulu dalam pembahasan peraturan, Minimnya inisiatif BAPEKAM dalam mengusulkan rancangan peraturan kampung. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kampung

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih rendah, Tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat masih lambat, Koordinasi dengan pemerintah kampung dalam menindaklanjuti aspirasi belum optimal. Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Penghulu Belum adanya

sistem pengawasan yang terstruktur, Keterbatasan pemahaman tentang mekanisme pengawasan, Kurangnya ketegasan dalam melakukan fungsi pengawasan. Hubungan antara BAPEKAM dan Penghulu Kampung Tualang terjalin dengan harmonis. Keduanya memahami serta menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang profesional. Dengan sikap saling menghargai dan menjalankan fungsi pengawasan secara seimbang, mereka mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan Kampung Benteng Hulu yang baik dan transparan.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).
- Badu, M. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 8(1), 24-28.
- Dewita, S. S., & Mashur, D. (2016). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Riau University).
- Pambudi, B., & Astrika, L. (2014). Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(4), 488-503.
- Poppy Gusti Rahayu. 2017. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak 2015-2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 36-54.
- Sagita, R. A., & Amaliatulwalidain, A. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 9-9.
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158-170.
- Sofian Malik. 2020. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal hukum*
- Sumaryadi, I. N., Indratmaja, A. B., & Hutabarat, N. E. (2010). Sosiologi pemerintahan: dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia. *Ghalia Indonesia*.

- Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 46-55.
- Suparti, H. (2021). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pada Aspek Pengawasan Untuk Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(2), 139-146.
- Syaputra, O. (2024). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Ujud Rusida dan Dadang Wirawan. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Bandung. *Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*.
- Yuhandra, E. (2016). Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 61-76.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun

Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.

Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.

Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.

Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).

Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.

Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.

Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.

Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

- Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.

- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.

- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).

- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.